

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin mendapat banyak perhatian belakangan ini. Hal ini disebabkan adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah yang menyebabkan adanya perubahan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan daerah. Faktor lain yang menyebabkan meningkatnya transplanti di Indonesia adalah banyaknya tingkat korupsi yang terjadi. Akibatnya, pemerintah dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Indonesia, baik pusat maupun daerah. Perhatian terhadap tingkat akuntabilitas di Indonesia berkembang dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, tanggung jawab, dan lebih berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik-baiknya (Mentu, 2016).

Akuntabilitas publik, diyakini merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tanpa akuntabilitas publik, prakarsa dan partisipasi masyarakat sebagai inti kekuatan negara sulit dibangun. Oleh karena itu, masing-masing institusi harus dapat membangun akuntabilitas peran dan fungsinya untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas dapat mendorong pemberdayaan masyarakat serta

tumbuhnya prakarsa, kreativitas maupun partisipasi masyarakat. Dapat mendorong proses demokrasi yang dimulai dari pemerintahan lokal, yakni kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat sekaligus mendorong terwujudnya pemerataan dan keadilan dalam bidang ekonomi. Terjadinya ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat juga tumbuh, yakni dengan cara menyebarkan dan mendekatkan pusat-pusat pengambilan keputusan (Sinarwati, 2014).

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas di sektor publik membuat manajemen sektor publik harus berupaya meningkatkan sistem akuntabilitasnya kearah yang lebih baik. Salah satu syarat untuk mewujudkan hal tersebut yaitu dengan melakukan reformasi dalam menyajikan laporan keuangan, dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat umum dalam rangka melaksanakan amanah rakyat (Aliyah, 2012). Penyusunan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya pada giliran selanjutnya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai secara efektif (Mentu, 2016).

Penyajian laporan keuangan daerah dapat memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta

sebagai bukti pertanggungjawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*). Laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasionalnya. Jika dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik dapat dijadikan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi (Aliyah, 2009). Sedangkan jika dilihat dari sisi eksternal dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, laporan keuangan dapat dijadikan alat pertanggungjawaban. Sehingga laporan keuangan sangat penting karena dapat mengukur sejauh mana kinerja sudah dilaksanakan dan menjadi alat bukti apakah kinerja sudah sesuai dengan kriteria akuntabel.

Faktor kedua adalah aksesibilitas laporan keuangan. Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Aliyah, 2009). Ketidakkampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, akan tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial.

Publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui media cetak ataupun elektronik masih belum menjadi hal yang umum bagi Sebagian daerah. Untuk itu alangkah baiknya pemerintah membuka ruang akses bagi publik

baik dari internal maupun eksternal dalam mengakses laporan keuangan dan tidak hanya kepada DPRD/Pemerintah pusat. Menyediakan ruang yang memadai dalam mengakses laporan keuangan dapat mencegah timbulnya *information asymetry* yang beranggapan bahwa banyak terjadi kesenjangan informasi antara pihak manajemen yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak konstituen yang berada diluar manajemen (Kusuma, 2012).

Keberlangsungan suatu organisasi dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menciptakan informasi yang terbuka, seimbang, dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan. Berkaitan Dengan adanya pengungkapan informasi tersebut akan dapat mengatasi masalah *information asymetry* antara masyarakat atau pihak konstituen yang memberikan amanah kepada pemerintah dalam mengelola sumber daya publik (Rosjidi, 2001).

Melalui aksesibilitas laporan keuangan dapat menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan. Dengan demikian, melalui aksesibilitas laporan keuangan, akuntabilitas publik dapat ditingkatkan.

Faktor yang ketiga adalah pengawasan fungsional. Fenomena yang terjadi dalam perkembangan akuntabilitas sektor publik di Indonesia belakangan ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik pusat maupun daerah. Untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan pengawasan terhadap organisasi sektor publik tersebut. Pengawasan fungsional

dapat dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah (Rosjidi, 2001).

Faktor yang keempat adalah audit kinerja. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik (Mardiasmo, 2009) mengatakan akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan dalam menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas publik, berupa perbaikan pertanggungjawaban manajemen kepada perwakilan. Pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang lebih jelas dan informatif. Audit kinerja adalah audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik (Alfano, 2012). Dari audit kinerja dapat diketahui apakah kinerja sudah berorientasi pada nilai ekonomis, efisien dan efektif seperti kebutuhan publik.

Di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2019, diketahui bahwa BPK mengeluarkan opini *disclaimer* atau menolak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh BPK tertulis bahwa Kabupaten Ponorogo menyajikan

laporan penyertaan modal yang tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan. BPK mengalami kesulitan untuk melakukan prosedur alternatif mengingat Organisasi Perangkat daerah tidak melakukan pencatatan atas mutasi persediaanya. Jikapun ada pencatatan, hanya dilakukan oleh sebagian OPD dan antar catatan atas persediaan tersebut tidak saling mendukung sehingga tidak dapat diverifikasi. Selain itu, penyajian aset tetap tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut. Jikapun daftar inventarisasi tersebut dimiliki, data tersebut sudah tidak mutakhir dan tidak valid yang disebabkan mutasi barang antar OPD tidak diikuti dengan mutasi pencatatannya (Prihandoko, 2020).

Laksana dan Handayani (2014) telah meneliti pengaruh kejelasan anggaran, pengawasan fungsional dan pelaporan kinerja terhadap akuntabilitas publik di kabupaten Batang. Hasil penelitiannya adalah semua variabel X yaitu X1 pengaruh kejelasan anggaran, X2 pengawasan fungsional dan X3 pelaporan kinerja secara parsial tidak berpengaruh pada variabel Y akuntabilitas publik.

Suratmi dan Nyoman (2014) meneliti tentang pengaruh audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel audit kinerja berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik, penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik, dan secara simultan audit kinerja, penyajian laporan keuangan, dan

aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik.

Wulandari (2013) menunjukkan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh terhadap akuntabilitas publik dan juga penelitian Rahayu (2011) yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan pada pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik. Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, peneliti tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas publik. Untuk itu, peneliti mengambil judul penelitian “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pengawasan Fungsional Dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Empiris Pada Badan Dan Dinas Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Ponorogo)”.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penyajian laporan keuangan memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas publik?
2. Apakah aksesibilitas laporan keuangan memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas publik?
3. Apakah pengawasan fungsional memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas publik?
4. Apakah audit kinerja memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas publik?

5. Apakah penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas publik?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.
- b. Mengetahui pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik.
- c. Mengetahui pengaruh pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas publik.
- d. Mengetahui pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik.
- e. Mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, pengawasan fungsional dan audit kinerja secara bersama-sama terhadap akuntabilitas publik.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi untuk bisa memberikan gambaran empiris dan menjadi bahan masukan mengenai variabel.

b. Bagi Akademisi

Hasil ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya pada akuntansi sektor publik serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

c. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, sebagai bekal yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja serta pengalaman berharga dalam konvergensi teori-teori ilmiah dengan fenomena di lapangan.

d. Bagi Penelitian yang akan datang

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan menambah wawasan sebagai referensi yang dapat dipergunakan untuk dasar penelitian selanjutnya.

